

| | |
|-------------|----------------------|
| Media Cetak | Kedaulatan rakyat |
| Tanggal | 04 Maret 2024 |
| Wilayah | Provinsi Jawa Tengah |



Bank Jawa Tengah Pasang 3.972 Alat Monitoring Pajak Daerah Halaman: 6

Bank Jateng Pasang 3.972 Alat Monitoring Pajak Daerah

SEMARANG (KR) - Untuk meningkatkan pajak daerah, PT Bank Jateng menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan koordinasi pajak daerah. Ini dilakukan karena Bank Jateng berkewajiban untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah.

Demikian dikatakan Plt Direktur Utama (Dirut) PT Bank Jateng Iriyanto Harko Saputro saat gelar koordinasi optimalisasi pajak daerah di Kantor Bank Jateng Semarang, Kamis (29/2). Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengawasan, sekaligus mencegah terjadinya pungli, gratifikasi, serta tindakan penyelewengan lainnya.

Iriyanto Harko Saputro mengatakan, KPK turut mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dengan memanfaatkan Alat Monitoring Pajak. Alat ini diadakan dengan tujuan Pemerintah Daerah turut memonitor transaksi yang terjadi pada Wajib Pajak, sehingga dapat mengkalkulasikan kewajiban pajak yang lebih relevan untuk dibayarkan.

"Sekarang ini dalam pemberantasan korupsi di daerah-daerah, KPK menitik beratkan pada hal persoalan optimalisasi pajak daerah, dan Bank Jateng diharapkan juga berperan dalam pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya," kata Iriyanto.

Menurut Iriyanto, saat ini ada 3.972 alat monitoring pajak daerah telah terpasang dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Terutama di industri Hotel, Hiburan, Restoran dan Karaoke (HOREKA). Fasilitas itu menjadi layanan untuk mempermudah pembayaran pajak. Dengan alat tersebut, Bank Jateng akan memperoleh keuntungan dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah. Yang secara langsung juga meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Jateng.

Dari data yang ada, peningkatan penerimaan pajak daerah dari 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan. Nominal transaksi tahun 2022 sebesar Rp 14 triliun dan 2023 Rp 16 triliun. Sedangkan frekuensi transaksi tahun 2022 sebanyak 1.306.932. Sementara tahun 2023 sebanyak 1.438.502. "Capaian tersebut tidak lepas dari support Bank Jateng dalam penyediaan Alat Monitoring Pajak Daerah, yang hingga saat ini total terdapat 3.972 unit alat yang ditempatkan di sejumlah Wajib Pajak," tutur Iriyanto.

Kasatgas Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, terkait Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Jawa Tengah, salah satu titik rawan korupsi di pemerintah daerah adalah pengelolaan dan pendapatan daerah. Untuk itu harus dilakukan langkah preventif dengan membenahi sistem administrasi pajak daerah. Sekaligus memberikan pemahaman bagi pegawai untuk menghindari pelanggaran. (Bdi)-f



Plt Dirut Bank Jateng Iriyanto Harko Saputro saat gelar koordinasi optimalisasi pajak daerah di Kantor Bank Jateng Semarang.

KR-Budiono

